



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

**KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkah dan Rahmat-Nya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar (Dinas Kominfotiksan) dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang akan digunakan sebagai pedoman Dinas Kominfo untuk merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran perangkat daerah dan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Penyusunan Renja adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2025. Rencana kerja ini menyajikan tujuan dan sasaran beserta program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Blitar pada tahun 2025. Renja 2025 disusun berdasarkan target kinerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024. Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kominfo disusun sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 tahun 2021.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BLITAR**



HERMAN WIDODO, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650916 199112 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Perubahan Renja - OPD	11
BAB II	15
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	15
2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	19
2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I.....	28
BAB III	71
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	71
Program dan Kegiatan.....	83
BAB IV	108
PENUTUP	108

DAFTAR TABEL

Table 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Semester I Tahun 2025	30
Table 2 Cross cutting sasaran strategis dan Mapping Indikator	51
Table 3 Reviu Rencana Kerja RKPD 2026 Dinas Kominfotiksan.....	66
Table 4 Perubahan Rencana Perangkat Daerah	74
Table 5 Persentase Capaian IKU Dinas Kominfotiksan.....	82
Table 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kominfotiksan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	89
Table 7 Rencana Aksi dan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kominfotiksan Tahun 2026	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan. Penyusunan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Peraturan ini adalah petunjuk pelaksanaan dan teknis dari Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan waktu dan substansinya. Rencana pembangunan ini juga dibedakan menurut jenjang, yaitu tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Sedangkan, perangkat daerah memiliki kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk waktu 1 tahun. Kedua dokumen menjadi dokumen resmi yang harus disusun dan digunakan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) PD memiliki 2 fungsi sekaligus, yaitu untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan teknis dan sebagai pedoman bagi seluruh kepala bidang dalam mengeluarkan anggaran (DPA) dan sekaligus untuk menyusun laporan pertanggungjaaban pengeluaran dana. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam renja harus bersumber dari yang sudah tertuang di dalam Rencana Strategis PD. Renja harus disusun dengan berpedoman pada dokumen rencana strategis perangkat daerah. Perubahan dapat dilakukan pada nilai

pagu sub kegiatan, dengan mempertimbangkan kebutuhan realisasi biaya dan persetujuan tim anggaran pemerintah daerah. Sedangkan, untuk indikator kinerja harus sinkron dengan indikator kinerja di dalam dokumen rencana strategis.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan R-APBD PD yang bersangkutan. Renja PD disusun beriringan dengan rancangan awal RKPD.

Sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Dinas Kominfotiksan) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar (RKPD) Tahun 2025. Program, kegiatan dan sub kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan sumber dana. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Renja Dinas Kominfo Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Kominfo dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2025 mulai bulan Juli 2025 sampai dengan Desember 2025;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RENJA PD) Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 18 Seri E);
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar;
22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 92/E);.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025;
24. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor : B/027.02.04.01/209/409.3.2/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Tahun 2025;

25. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : B/050.03/590/409.3.2/2025 tentang Penyelarasan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Pendanaan Indikatif Belanja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan perangkat daerah dalam pembangunan daerah. Penyusunan Perubahan Renja tahun 2025 dipergunakan pula untuk mensinergikan ulang kesenjangan yang terjadi setelah dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan renja PD di tahun 2024 serta sebagai tolok ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja tahun 2025 adalah untuk:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kominfo tahun 2021-2026 dalam rencana tahunan yaitu tahun 2025;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan PD serta merancang kebijakan dan strategi percepatan pembangunan sesuai dengan perubahan kondisi terkini.
4. Sebagai dasar acuan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan OPD yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Perubahan Renja - OPD

Secara garis besar, sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Analisis kinerja Pelayanan PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kominfotiksan triwulan I tahun 2025. Selanjutnya juga berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang digambarkan dalam format Tabel T-C.30. serta jika dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Capaian Renstra PD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas, pokok dan fungsi serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.2. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

Berisikan uraian mengenai :

- Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
- Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan
- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.3. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan triwulan I dengan mengacu APBD Tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rancangan Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD;
6. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dimana akan disajikan dalam Tabel E-81 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandaian Kabupaten Blitar.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Berisikan uraian penjabaran dari Tabel Pendanaan dan Rencana Kerja dari Lampiran Renja SIPD Perubahan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
TAHUN 2025

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di Kabupaten Blitar. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan lainnya;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran di Dinas Kominfo;
- c. penyusunan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, data dan statistik;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, data dan statistik;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kominfo.

Dalam melaksanakan pelayanan didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur sejumlah keseluruhan 37 (tiga puluh tujuh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang. Selain didukung oleh sumber daya aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Kominfo juga didukung oleh adanya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia. Untuk pelaksanaan kegiatannya Dinas Kominfo bekerja sama juga dengan RTIK dan LPPL Persada. Kedua organisasi ini dibawah binaan Dinas Kominfo yang sebagai tugasnya untuk membantu Dinas Kominfo dalam penyebaran informasi ke masyarakat dan juga untuk

membantu dalam bimbingan teknis untuk peningkatan sumber daya manusia agar pemanfaatan teknologi tidak sia sia.

Dengan adanya perkembangan dibidang teknologi informasi maka diharapkan ketersediaan dan keakuratan data yang dihasilkan atau disajikan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan layanan publik berbasis elektronik. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel 3 terlampir :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel 3 terlampir :

Table 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			BB	BB	BB	BB	BB	BB	B	-	BB	
2	Nilai Tata Kelola SPBE			4,22	4,25	4,27	4,30	2,60	2,30	3,0	-	4,32	Evaluasi SPBE Tahun 2025 akan dilaksanakan bulan September-Oktober Tahun 2025
3	Nilai Layanan SPBE			4,28	4,29	4,30	4,32	3,20	3,51	4,2	-	4,34	

Dari tabel di atas dapat diketahui Capaian Kinerja pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Blitar untuk IKU belum sesuai target yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra Dinas Kominfo karena berbagai hal, yaitu adanya masa transisi perubahan IKU mengikuti RPJMD 2021-2026 pada tahun 2022 dan adanya perubahan paramater indikator penilaian terhadap Nilai Tata Kelola SPBE dan Nilai Layanan SPBE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perubahan paramater ini berupa tambahan dan perubahan bobot indikator, dampaknya nilai Indeks SPBE rata-rata seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami penurunan. Maka, berdasar hasil rapat internal disepakati untuk melakukan penurunan target IKU menjadi diantara 3-3,1. Perubahan target ini sebagai respon terhadap perubahan peraturan dalam penilaian SPBE oleh Kementerian Kominfo.

Nilai indeks SPBE Kabupaten Blitar pada tahun 2018 sebesar 2,14 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 2,9, atau lebih tinggi dibanding rata-rata Nilai Indeks SPBE Nasional sebesar 2,18. Adapun pada tahun 2020 berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: B/386/M.KT.03/2020 perihal Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2020, Kabupaten Blitar tidak termasuk di dalam 130 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang diambil sebagai sampling evaluasi SPBE. Pada tahun 2021 terdapat penambahan indikator dari 37 menjadi 47 indikator dalam penilaian SPBE, sehingga berdampak terhadap capaian nilai Indeks SPBE sebesar 2,76 atau masuk kategori "Baik". Adapun Tahun 2022 Indeks SPBE Kabupaten Blitar kembali turun menjadi sebesar 2,61 atau masuk kategori "Baik". Capaian ini memang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,76, namun masih lebih tinggi dibanding rata-rata Indeks SPBE Nasional sebesar 2,35. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2022 oleh Kementerian PAN dan RB, dari 4 domain penilaian SPBE (Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE), domain Manajemen SPBE memiliki nilai yang terendah. Domain ini terdiri dari aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK, termasuk Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data. Ke depan, aspek-aspek inilah yang perlu diperkuat kinerjanya, terlebih dengan kebijakan satu data, maka Manajemen Data SPBE menjadi penting karena menentukan

kualitas pengelolaan data sehingga dapat diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023, capaian naik secara sangat signifikan, dimana skor Indeks SPBE Kabupaten Blitar menjadi 3,63 poin, yang mana angka ini mampu mencapai target kinerja nilai Indeks SPBE sebesar 3,00 poin atau target kinerja IKU daerah tercapai kinerja sebesar 121% di tahun 2023. Kenaikan skor nilai Indeks SPBE ini diikuti dengan kenaikan skor komponen/variabel Indeks SPBE, yaitu indeks Tata Kelola SPBE sebesar 3,60 poin dan nilai layanan SPBE sebesar 4,07 poin. Sementara di Tahun 2024 capaian nilai SPBE meningkat sebesar 0,14 poin yaitu menjadi 3,77.

Identifikasi permasalahan yang masih terjadi pada tahun 2023 ada 4 hal, yaitu *pertama*, belum optimalnya capaian Indeks SPBE khususnya untuk komponen/ variabel indeks Tata Kelola SPBE dan nilai layanan SPBE; *kedua*, cakupan wilayah/ ruang publik terkoneksi internet masih perlu diperluas, sebagai bagian dari upaya untuk penguatan program *smart city*; *ketiga*, peningkatan kualitas sistem jaringan untuk meningkatkan kecepatan akses dan layanan publik oleh perangkat daerah dan *keempat*, peningkatan kualitas nilai keterbukaan informasi publik daerah. Sementara di Tahun 2024 identifikasi permasalahan lebih berat pada kurangnya komitmen pimpinan OPD pendukung lain serta kualitas SDM pelaksana di Dinas Kominfotiksan maupun perangkat daerah lain yang *supporting*. Adapun target capaian nilai indeks SPBE Kabupaten Blitar di Tahun 2025 adalah 4,07, hal ini tentu memerlukan usaha dan kerja keras serta kolaborasi yang harmonis dari seluruh pihak. Maka dari itu di tengah gelombang efisiensi anggaran ini diharapkan komitmen pimpinan menjadi motivasi yang luar biasa untuk meningkatkan capaian nilai indeks SPBE Kabupaten Blitar.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan hasil analisis evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 dan tabel 3 maka yang menjadi isu utama dalam pencapaian kinerja Dinas Kominfo adalah adanya perubahan indikator pada RPJMD baru sehingga

mempengaruhi perubahan IKU dinas menjadikan prioritas kinerja OPD berubah. Kurang selarasnya indikator untuk tiap dokumen sehingga mempengaruhi capaian kinerja dan juga kurangnya review dan monitoring terhadap adanya aturan-aturan baru yang mempengaruhi perubahan-perubahan target dan capaian kinerja dinas. Selain itu, adanya perubahan parameter indikator penilaian terhadap Nilai Tata Kelola SPBE dan Nilai Layanan SPBE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, berupa tambahan dan perubahan bobot indikator, sehingga berdampak terhadap capaian nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami capaian penurunan.

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui program dan kegiatannya khususnya program kegiatan strategis dari tahun ketahun berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan. Dinas Kominfo tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota khususnya dibidang peningkatan kualitas Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk mencapai target. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kominfo antara lain :

1. Melakukan koordinasi dalam hal gerakan optimalisasi pelayanan publik perlu dimaksimalkan baik secara vertikal dan horizontal dilingkungan pemerintah daerah kabupaten blitar;
2. Tuntutan pelayanan berbasis digital dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat, dan efisien perlu perbaikan sistem di aplikasi teknologi komunikasi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat secara lebih luas diseluruh pemerintahan kabupaten Blitar;
3. Memperkuat jaringan komunikasi internet diseluruh wilayah kabupaten Blitar agar tercapainya target layanan Dinas Kominfotiksan;
4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur khususnya dalam bidang keamanan informasi seiring dengan makin

maraknya aksi kejahatan *cyber* untuk mengambil berbagai data-data kegiatan pemerintahan.

5. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pendukung penyelenggaraan SPBE di masing-masing perangkat daerah serta komitmen pimpinan yang harus semakin diperkuat.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparturnya yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya. Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunaannya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya. Penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean governance* telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam publikasi pembangunan daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan disegala bidang. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kab Blitar terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan informasi belum optimal disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan anggaran operasionalnya.
2. Jumlah personil dan kualitas sumber daya aparatur yang belum sebanding dengan beban kerja dan luasnya wilayah yang ditangani.
3. Masih terdapat masyarakat yang belum mendapat akses internet.
4. Masih terdapat masyarakat yang belum melek digital literasi.
5. Infrastruktur digital masih belum tersebar luas dengan kualitas yang cukup.
6. Keterbatasan jumlah SDM aparatur dalam bidang Teknologi Informasi di khususnya untuk mengelola infrastruktur jaringan TI dan menangkal berbagai potensi serangan kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

7. Perkembangan dunia TIK yang sangat cepat dan massif, berdampak pada tingkat kemampuan kompetensi SDM aparatur bidang TIK yang harus diupdate.
8. Kurangnya kesadaran dari aparatur untuk lebih mandiri dalam memahami peraturan-peraturan perundangan dan mengemban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam optimalisasi pelayanan.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
- b. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan layanan publik berbasis elektronik di daerah.
- c. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- d. Membuat kebijakan terkait dengan pelayanan publik dan daerah serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan OPD lain melalui digital literasi.
- e. Peningkatan kesadaran apartur dalam tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik sehingga sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.

Dari beberapa kegiatan yang dilakukan juga mendukung SDG's. Analisis yang dilakukan telah berkontribusi guna mencapai indikator SDG's goal 9 yaitu industri, inovasi dan infrastruktur.

Berdasarkan hasil analisis evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Dinas Kominfotiksan sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 dan tabel 3 maka yang menjadi isu utama dalam pencapaian kinerja Dinas Kominfo adalah adanya perubahan indikator pada RPJMD baru sehingga

mempengaruhi perubahan IKU dinas menjadikan prioritas kinerja OPD berubah. Kurang selarasnya indikator untuk tiap dokumen sehingga mempengaruhi capaian kinerja dan juga kurangnya review dan monitoring terhadap adanya aturan-aturan baru yang mempengaruhi perubahan-perubahan target dan capaian kinerja dinas.

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui program dan kegiatannya khususnya program kegiatan strategis dari tahun ketahun berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan. Dinas Kominfotiksan tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota khususnya dibidang peningkatan kualitas Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk mencapai target. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kominfotiksan antara lain :

1. Melakukan koordinasi dalam hal gerakan optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi TIK perlu dimaksimalkan baik secara vertikal dan horizontal dilingkungan pemerintah daerah kabupaten blitar;
2. Tuntutan pelayanan berbasis digital dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat, pasti, dan efisien perlu perbaikan sistem di aplikasi teknologi komunikasi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat secara lebih luas diseluruh pemerintahan kabupaten Blitar;
3. Memperkuat jaringan komunikasi internet di seluruh wilayah kabupaten Blitar agar tercapainya target layanan Dinas Kominfo;
4. Dalam situasi yang mulai membaiknya kondisi pasca pandemi covid 19 dan mulai stabilnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2024, diharapkan kualitas layanan Dinas Kominfo semakin baik karena menjadi bisa lebih optimal dalam melayani masyarakat.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya. Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunanya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya. Penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean governance* telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam publikasi pembangunan daerah.

Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan disegala bidang. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfotiksan Kab Blitar terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan informasi belum optimal disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan anggaran operasionalnya.
2. Jumlah personil dan sumber daya aparatur yang belum sebanding dengan beban kerja dan luasnya wilayah yang ditangani.
3. Masih terdapat masyarakat yang belum mendapat akses internet.
4. Masih terdapat masyarakat yang belum melek digital literasi.
5. Infrastruktur digital masih belum tersebar luas dengan kualitas yang cukup.
6. Kurangnya kesadaran dari aparatur untuk lebih mandiri dalam memahami peraturan-peraturan perundangan dan mengemban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam optimalisasi pelayanan.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. a. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
- b. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan layanan publik berbasis elektronik di daerah.
- c. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- d. Membuat kebijakan terkait dengan pelayanan publik dan daerah serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan OPD lain melalui digital literasi.
- e. Peningkatan kesadaran apartur dalam tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik sehingga sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.

Dari beberapa kegiatan yang dilakukan juga mendukung SDG's. Analisis yang dilakukan telah berkontribusi guna mencapai indikator SDG's goal 9 yaitu industri, inovasi dan infrastruktur. Inovasi yang didukung adalah inovasi untuk peningkatan layanan publik berbasis TIK, menuju layanan yang efektif, efisien, pasti dan akuntabel. Sehingga, mendorong kemudahan proses administrasi investasi atau *easy doing business*.

Berdasarkan hasil analisis evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo sebagaimana ditampilkan pada tabel 2 dan tabel 3 maka yang menjadi isu utama dalam pencapaian kinerja Dinas Kominfo adalah adanya perubahan indikator pada RPJMD baru sehingga mempengaruhi perubahan IKU dinas menjadikan prioritas kinerja OPD berubah. Kurang selarasnya indikator untuk tiap dokumen sehingga mempengaruhi capaian kinerja dan juga kurangnya review dan monitoring terhadap adanya aturan-aturan baru yang mempengaruhi perubahan-perubahan target dan capaian kinerja dinas. Selain itu, adanya perubahan paramater indikator penilaian terhadap Nilai Tata Kelola SPBE dan Nilai Layanan SPBE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, berupa tambahan dan perubahan bobot indikator, sehingga berdampak terhadap capaian nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami capaian penurunan.

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melalui program dan kegiatannya khususnya program kegiatan strategis dari tahun ketahun berupaya dengan maksimal untuk melakukan tupoksinya demi tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan. Dinas Kominfo tetap melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan dengan pemerintah pusat (kementerian/lembaga) serta pemerintah kabupaten/kota khususnya dibidang peningkatan kualitas Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas agar sesuai dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk mencapai target. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kominfo antara lain :

- 1.Melakukan koordinasi dalam hal gerakan optimalisasi pelayanan publik perlu dimaksimalkan baik secara vertikal dan horizontal dilingkungan pemerintah daerah kabupaten blitar;
- 2.Tuntutan pelayanan berbasis digital dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, akurat, dan efisien perlu perbaikan sistem di aplikasi teknologi komunikasi yang dapat memproses dan memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat secara lebih luas diseluruh pemerintahan kabupaten Blitar;
- 3.Memperkuat jaringan komunikasi internet diseluruh wilayah kabupaten Blitar agar tercapainya target layanan Dinas Kominfo;
- 4.Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur khususnya dalam bidang keamanan informasi seiring dengan makin maraknya aksi kejahatan *cyber* untuk mengambil berbagai data-data kegiatan pemerintahan.
- 5.Dalam situasi yang mulai membaiknya kondisi pasca pandemi covid 19 dan mulai menggeliatnya ekonomi di tahun 2022, diharapkan kualitas layanan Dinas Kominfo semakin baik karena menjadi bisa lebih optimal dalam melayani masyarakat.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas sumber daya aparturnya yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan daerah lainnya.

Teknologi saat ini telah memudahkan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh penggunanya. Memudahkan pertukaran informasi melalui dunia maya. Penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean governance* telah menciptakan perubahan-perubahan penting dalam praktek pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perubahan tersebut diantaranya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi dan akuntabilitas dalam publikasi pembangunan daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah dituntut segera menyesuaikan program dan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan disegala bidang. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan informasi belum optimal disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan anggaran operasionalnya.
2. Jumlah personil dan sumber daya aparatur yang belum sebanding dengan beban kerja dan luasnya wilayah yang ditangani.
3. Masih terdapat masyarakat yang belum mendapat akses internet.
4. Masih terdapat masyarakat yang belum melek digital literasi.
5. Infrastruktur digital masih belum tersebar luas dengan kualitas yang cukup.
6. Keterbatasan jumlah SDM aparatur dalam bidang Teknologi Informasi di khususnya untuk mengelola infrastruktur jaringan TI dan menangkalkan berbagai potensi serangan kejahatan dunia maya (cyber crime).
7. Perkembangan dunia TIK yang sangat cepat dan massif, berdampak pada tingkat kemampuan kompetensi SDM aparatur bidang TIK yang harus diupdate.
8. Kurangnya kesadaran dari aparatur untuk lebih mandiri dalam memahami peraturan-peraturan perundangan dan mengemban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam optimalisasi pelayanan.

Dampak dari kendala tersebut dapat menghambat/mempengaruhi proses pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat melalui program-program strategis yang telah tertuang dalam visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Memaksimalkan sumber daya aparatur yang tersedia dengan meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui kegiatan-kegiatan bimtek, diklat, kursus atau sejenisnya.
- b. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait dalam rangka mengatasi permasalahan layanan publik berbasis elektronik di daerah.
- c. Melakukan sinergitas program dan kegiatan dengan rencana pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- d. Membuat kebijakan terkait dengan pelayanan publik dan daerah serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan OPD lain melalui digital literasi.
- e. Peningkatan kesadaran aparat dalam tugas dan fungsinya sebagai pelayanan publik sehingga sesuai dengan standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan masing-masing.

Dari beberapa kegiatan yang dilakukan juga mendukung SDG's. Analisis yang dilakukan telah berkontribusi guna mencapai indikator SDG's goal 9 yaitu industri, inovasi dan infrastruktur.

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I

Untuk menetapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan Evaluasi hasil capaian Renja tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD.

Tahun 2025 dalam periode Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah merupakan tahun keempat pada periode renstra 2021-2026. Nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pada tahun

2025 pedoman nomenklatur dan indikator dengan menggunakan permendagri nomor 050-5889 tahun 2021.

Selain itu pada tahun 2025 juga dilakukan beberapa penyesuaian, penyesuaian yang dilakukan diantaranya :

1. Melakukan pemetaan awal program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021.
2. Melakukan pengukuran evaluasi capaian kinerja sehingga diketahui persentase tercapainya kinerja pada periode transisi.
3. Menyesuaikan target indikator kinerja disesuaikan dengan perhitungan menggunakan indikator kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021.

Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar pada semester I Tahun 2025 dilaksanakan melalui 5 Program, 12 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.535.536.637,00 (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.495.827.785,21 (Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Satu Rupiah) atau sebesar (43,16%). Serapan ini masih tergolong rendah untuk semester I karena masih di bawah 50%.

Berikut tabel hasil evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan semester I Tahun 2025.

Table 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Semester I Tahun 2025

no	Sasaran	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Ou tcome)/ Kegiatan(Ou tput)/ Sub Kegiatan(Ou tput)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Pada Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12=8+9+10+ 11		13=(12/7)*100%		14=6+12		15= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	98%	18.423 .011.2 87	94 %	5.997. 731.99 1	96 %	5.138. 989.73 7	23	1.22 5.39 3.91 6	47	96.6 52.9 17.3 67	47	97.878 .311.2 83	47,96	1.904, 62	47	103.87 6.043. 274	47,9 6	47,9 6	103.876. 043.274

		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	85%	500.00 0.000	94 %	102.20 3.700	96 %	112.35 0.227	80	19.4 14.5 71	6	7.64 5.20 0	6	27.059 .771	7,06	24,09	6	129.26 3.471	7,08	2.58 5,27	129.263. 471
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra Renja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	15	2.000. 000	3	23.170 .900	3	31.770 827	0	0	0	0	2	0	13,33	0	2	23.170 .900	13,3 3	1.15 8,55	23.170.9 00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	3.000. 000	4	79.032 .800	4	80.579 .400	2	19.4 14.6 71	1	7.64 5.20 0	1	27.059 .771	4,76	33,58	1	106.09 2.571	4,76	3.53 6,42	106.092. 571

		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabel	85	14.22 3.606. 370	94	3.209. 031.2 55	99 6	3.592. 988.4 17	24	950. 276. 204	46	95.4 82.0 64.8 00	46	96.43 2.341. 004	54,12	2.683, 90	46	99.64 1.372. 259	54,1 2	700, 54	99.641. 372.259
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	150	14.080 .406.6 70	28	3.173. 907.35 5	28	3.563. 624.46 7	28	948. 962. 204	28	95.4 64.0 64.8 00	28	96.413 .027.0 04	18,67	2.705, 48	28	99.586 .934.3 59	18,6 7	707, 27	99.586.9 34.359
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	150	137.20 0.000	1	29.490 .000	1	28.000 .000	0	0	1	18.0 00.0 00	1	18.000 .000	0,67	64,29	1	47.490 .000	0,67	34,6 1	47.490.0 00

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25	5.999.700	7	5.633.900	7	1.363.950	7	1.314.000	7	0	0	1.314.000	28,00	96,34	7	6.947.900	28,00	115,80	6.947.900
		Kegiatan Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum yang Dilaksanakan Secara Akuntabel	85	1.286.988.980	94	1.601.626.003	96	188.418.177	24	49.407.463	46	34.968.630	46	84.376.093	54,12	44,78	46	1.686.002.096	54,12	131,00	1.686.002.096

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jenis komponen instansi listrik/pener angan bangunan kantor yang disediakan yang disediakan	10	523.29 0000	10	2.691. 000	10	3.236. 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.691. 000	0	5,14	2.691.00 0,
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkap an kantor yang disediakan	14	451.73 0.475	14	19.470 .300	14	14.241 .900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.470 .300	0	4,31	19.470.3 00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8	123.60 3.760	8	35.562 .500	8	19.702 .977	0	0	0	0	0	0	50,00	0	4,00	35.562 .500	50,0 0	28,7 7	35.562.5 00

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1	1.562.000	1	1.562.000	1	1.750.000	1	258.000	1	376.000	1	634.000	100	36,23	1,00	2.196.000	100,00	140,59	2.196.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	6	298.668.745	6	1.340.410.000	6	89.272.200	6	11.474.000	6	15.816.000	6	27.290.000	100,00	30,57	6,00	1.367.700.000	100,00	457,93	1.367.700.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	359.095.000	1	201.930.203	1	60.214.600	1	37.675.463	1	18.776.630	1	56.452.093	100,00	93,75	1,00	258.382.296	100,00	71,95	258.382.296

		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85	291.000.000	94	13.085.000	96	73.335.000	24	0	46	0	46	0	54,12	0	46	13.085.000	54,12	4,50	13.085.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	291	291.000.000	28	13.085.000	28	73.335.000	0	0	0	0	0	0	4,81	0	14,00	13.085.000	4,81	4,50	13.085.000

		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	84	1.019.996.345	94	133.752.000	96	5.031.000	24	0	46	0	46	0	54,76	0	46	133.752.000	54,76	13,11	133.752.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	70	1.019.996.345	14	133.752.000	14	5.031.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.752.000	0	13,11	133.752.000

		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang disediakan tepat waktu	85	895.4 72.36 9	94	742.2 98.14 0	94	753.9 59.81	24	176. 350. 678	46	156. 783. 291	46	333.1 33.96 9	54,12	44,18	46	1.075. 432.1 09	54,1 2	120, 10	1.075.4 32.109
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat- menyurat	12	20.000 .269	1	4.160. 000	1	1.490. 000	1	0	1	0	1	0	8,33	0	1	4.160. 000	8,33	20,8 0	4.160.00 0
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	34.000 .000	1	309.39 2	1	60.725 .400	1	12.4 66.5 74	1	10.1 22.5 23	1	22.589 .097	8,33	37,20	1	22.898 .489	8,33	67,3 5	22.898.4 89

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	841.47 2.100	1	737.82 8.748	1	691.74 4.416	1	163. 884. 104	1	146. 660. 768	1	310.54 4.872	8,33	44,89	1	1.048. 373.62 0	8,33	124, 59	1.048.37 3.620
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dalam kondisi baik	85	700.9 47.22 3	94	195.7 35.89 3	96	412.9 07.10 0	24	29.9 45.0 00	46	971. 455. 446	46	1.001. 400.4 46	54,12	242,5 2	46	1.197. 136.3 39	54,1 2	170, 79	1.197.1 36.339
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12	444.94 7.223	12	133.12 4.190	12	270.90 8.550	12	25.1 70.0 00	12	33.4 55.4 46	12	58.625 .446	100,00	21,64	12	191.74 9.636	100	43,0 9	191.749. 636

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1	256.000.000	1	62.611.703	1	141.998.550	1	4.775.000	1	938.000.000	1	942.775.000	100,00	663,93	1	1.005.386.703	100	392,73	1.005.386.703
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	90	13.325.279.888	88	3.963.830.270	90	1.963.883.800	20	173.298.090	40	11.778.799.990	40	11.952.098.080	44,44	608,59	40	15.915.928.350	44,44	44,44	15.915.928.350
		<i>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM</i>	80	13.325.279.888	85	3.963.830.270	90	1.963.883.800	22	173.298.090	42	11.778.799.990	42	11.952.098.080	52,50	608,59	42	15.915.928.350	52,50	119,44	15.915.928.350
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diseminasi informasi di media intern	12	11.220.479.888	1	3.214.627.794	99	1.451.028.800	21	81.916.940	36	280.573.090	36	362.490.030	300,00	24,98	36	3.577.117.824	300,00	31,88	3.577.117.824

		Pelayanan Informasi Publik	Pembinaan PPID pembantu	54	822.30 0.000	1	90.461 .692	4	218.42 0.000	1	35.6 45.0 00	1	4.95 0.00 0.00 0	1	4.985. 645.00 0	1,85	2.282, 60	1	5.076. 106.69 2	1,85	617, 31	5.076.10 6.692
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Hasil survey kepuasan masyarakat	9	1.282. 500.00 0	2	658.74 0.784	2	294.43 5.000	1	55.7 36.1 50	1	6.54 8.22 6.90 0	1	6.603. 963.05 0	11,11	2.242, 93	1	7.262. 703.83 4	11,1 1	566, 29	7.262.70 3.834
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	90 100	31.785 .133.5 62	70 10 0	4.357. 987.00 0	90 10 0	4.786. 239.85 0	50 100	804. 270. 600	60 10 0	102. 999. 685. 000	60 10 0	103.80 3.955. 600	83,34	2.168, 80	60 100	108.16 1.942. 600	66,6 7 100, 00	83,3 4	108.161. 942.600
		<i>Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota</i>	<i>Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo</i>	100	31.78 5.133. 562,0 0	10 0	4.357. 987.0 00,00	10 0	4.228. 766.5 00,00	100	688. 927. 600, 00	10 0	102. 994. 590. 000, 00	10 0	103.6 83.51 7.600, 00	100.00	2.451, 86	100. 00	108.0 41.50 4.600, 00	100. 00	339, 91	108.041 .504.60 0,00

		Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	138	31.785.133.562,00	154	4.357.987.000,00	1	4.228.766.500,00	1	688.927.600,00	1	102.994.590.000,00	1	103.683.517.600,00	56.16	2.451,86	77.50	108.041.504.600,00	56.16	339,91	108.041.504.600,00
		Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	52	0,00	22	0,00	23	557.473.350,00	1	115.343.000,00	10	5.095.000,00	10	120.438.000,00	19.23	21,60	10	120.438.000,00	19.23		120.438.000,00
		Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional		0,00		0,00	25	15.600.000,00	5	0,00		0,00	5	0,00	Infinity	0,00	5	0,00	Infinity		0,00

		Fasilitasi penyelenggara SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggara SPBE di lingkungan Pemda		0,00		0,00	1	42.144.000,00	1	480.000,00		0,00	1	480.000,00	Infinity	1,14	1.00	480.000,00	Infinity		480.000,00
		Penyelenggara pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00	0,00			0,00
		Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		0,00		0,00	1	109.185.450,00	1	1.230.000,00	1	2.140.000,00	Infinity	1,96	1.00	2.140.000,00	Infinity		2.140.000,00	1	2.140.000,00

		Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		0,00		0,00	31	356.348.800,00	15	113.633.000,00	2	4.185.000,00	2	117.818.000,00	Infinity	33,06	2	117.818.000,00	Infinity		117.818.000,00
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		0,00		0,00	3	14.837.000,00		0,00		0,00	3	0,00	Infinity	0,00	3	0,00	Infinity		0,00
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/ Kota Cerdas		0,00		0,00	52	19.358.100,00		0,00		0,00	52	0,00	Infinity	0,00	52	0,00	Infinity		0,00

		Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	0,00			0,00
		Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/ Kota Cerdas		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00	0,00			0,00

		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	90	0	80	0	70	595.53 6.900	20	17.2 65.9 00	40	206. 894. 174	40	224.16 0.074	44,44	37,64	40	224.16 0.074	44,4 4	44,4 4	224.160. 074
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	60	0	52	0	52	595.5 36.90 0	52	17.2 65.9 00	52	206. 894. 174	52	224.1 60.07 4	86.67	37,64	52,0 0	224.1 60.07 4	86,6 7	0	224.160 .074

		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		0,00		0,00	54	77.164.000,00	54	805.000,00	54	3.220.000,00	54	4.025.000,00	Infinity	5,22	54	4.025.000,00	Infinity		4.025.000,00
		Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan		0,00		0,00	100	15.532.800,00		0,00		0,00	100	0,00	Infinity	0,00	100	0,00	Infinity		0,00
		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		0,00		0,00	60	9.646.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00

		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		0,00		0,00	15	456.162.000,00		0,00	15	198.811.674,00	15	198.811.674,00	Infinity	43,58	15	198.811.674,00	Infinity		198.811.674,00
		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik		0,00		0,00	30	37.031.300,00	30	16.460.900,00	30	4.862.500,00	30	21.323.400,00	Infinity	57,58	30	21.323.400,00	Infinity		21.323.400,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	90	0	100	260.907.228	100	323.919.450	100	25.250.000	100	66.450.000	100	91.700.000	111,11	28,31	100	352.607.228	111,11	111,11	352.607.228

		<i>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian</i>	80	58.970.413	75	521.814.456	80	647.838.900	20	50.500.000	15	66.450.000	15	116.950.000	25,00	18,05	15	638.764.456	25,00	1.083,19	638.764.456
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah aplikasi persandian yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE		0	1	260.907.228	1	323.919.450		25.250.000		66.450.000	1	91.700.000	Infinity	28,31	1	352.607.228	Infinity		352.607.228

Dalam hal capaian kinerja kegiatan seperti yang terdapat dalam tabel diatas pada tahun 2025 masih tercapai rata-rata 43,16% dari target yang telah ditetapkan, artinya masih dibawah rata-rata yaitu 50% karena tahun 2025 mendekati akhir tahun dari renstra periode 2021-2026 maka target kinerja yang belum terpenuhi sebesar 6,84% masih bisa dikatakan bahwa kinerjanya cukup baik, mengingat periode ini masih semester I Tahun 2025. Pencapaian target tahun 2025 adalah masa gelombang efisiensi, dimana pengurangan anggaran berakibat pada penyesuaian rencana aksi bidang-pidang pengampu program. Meskipun demikian capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan oleh bidang-bidang sudah banyak yang melebihi target yang ditetapkan dalam renstra dan renja 2025, sehingga dapat terus ditingkatkan capaiannya.

Pada perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 804.000.000,- yang digunakan untuk :

1. Optimalisasi Wifi Publik di 28 Kelurahan Rp.43.000.000,-
2. Pemindahan Videotron Rp.160.000.000,-
3. Belanja Publikasi/Diseminasi Program Pembangunan Daerah Rp.200.000.000,-
4. Belanja Publikasi Kegiatan KDH/WKDH Rp.165.000.000,-
5. Pembayaran Tagihan Listrik Persada Rp.36.000.000,-
6. Belanja Sosialisasi Kegiatan DBHCHT Rp.200.000.000,-

Atas hasil pencapaian kinerja program dan kegiatan tersebut masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian kinerja sasaran OPD sesuai dengan cross cutting sasaran strategis. Untuk tahun 2024 dan 2025 sendiri sudah dilakukan mapping indikator seperti yang tersaji dalam tabel berikut

Table 2 Cross cutting sasaran strategis dan Mapping Indikator

No	Kepmen 050-5889 Tahun 2024 (Ranwal Renja)					Kepmen 050-5889 Tahun 2025					GIVEN SIPD	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Given SIPD	Target
					Tahun 2025					Tahun 2025		Tahun 2025
					Target					Target		Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota			Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	92%	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota			Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	94%		
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	8 dokumen		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	94%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	3 dokumen			"Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen		

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	4 dokumen			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen		
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang disediakanJumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	4 dokumen		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	94 %		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	27 orang			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/bulan		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	27 orang			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran OPD	5 dokumen 2 dokumen			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7 dokumen		

		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	30 orang		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94 %		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	0 Orang			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan	270 orang							
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100 %		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 jenis			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	14 jenis			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	6 jenis			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket		

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 eksemplar			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	341 eksemplar			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	98 kali			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan		
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	14 jenis bulan		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat sasaran	94 %		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	14 set			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 unit		

		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	94 %		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan		
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	94 %		

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan rumah jabatan /dinas yang mendapat pemeliharaan	1 jenis			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		
	2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	80%	2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	88%		

		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah layanan informasi	300 berita		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah layanan Informasi	300 berita		
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi dan akses informasi	2 kali			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 dokumen		
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah cakupan informasi yang didesiminasikan melalui media pemerintah dan non pemerintah	100 %			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 dokumen		
			Pelayanan Informasi Publik	Cakupan pelayanan permohonan informasi publik sesuai UU no 14 tahun 2008	100%			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Berita Acara		
	3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	30%	3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70%		

				Persentase Perangkat Daerah yang terlayani infrastruktur TIK	100%				Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	100%		
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	52 OPD		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%		
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi jaringan backbone pemkab blitar	52 OPD			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	154 unit		
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	2 kebijakan		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	19 kebijakan		

			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	52 OPD			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit		
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah dokumen monitoring smart city	4 laporan			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	52 Unit		
				Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smartcity	52 OPD			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen		

			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan dinas Kominfo	1 orang			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen		
				Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web sesuai standar	52 OPD			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 dokumen		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi internal SPBE	1 laporan							

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	50%	3. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	80%		
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah survey statistik sektoral dan kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	2 kali		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah survey statistik sektoral dan kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	2 kali		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan dan mendapat rekomendasi BPS	4 dokumen		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 dokumen		
				Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai jenis siklus datanya	52 OPD							

			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah kelengkapan metadata indikator sektoral	1 dokumen			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 dokumen		
				Jumlah kelengkapan metadata statistik sektora	1 dokumen							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100%		
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	100%		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota		jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian	75 %		

			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Presentase sistem elektronik (aplikasi) yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian	60 %			Pelaksana an Keamana n Informasi Pemerinta han Daerah Kabupate n/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan		
--	--	--	--	---	------	--	--	--	---	-----------	--	--

Dari tabel di atas dapat diketahui Capaian Kinerja pelayanan Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar untuk IKU belum sesuai target yang telah ditetapkan pada dokumen Renstra Dinas Kominfotiksan karena berbagai hal, yaitu adanya masa transisi perubahan IKU mengikuti RPJMD 2021-2026 pada tahun 2022 dan adanya perubahan paramater indikator penilaian terhadap Nilai Tata Kelola SPBE dan Nilai Layanan SPBE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perubahan paramater ini berupa tambahan dan perubahan bobot indikator, dampaknya nilai Indeks SPBE rata-rata seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami penurunan. Maka, berdasar hasil rapat internal disepakati untuk melakukan penurunan target IKU menjadi diantara 3-3,1. Perubahan target ini sebagai respon terhadap perubahan peraturan dalam penilaian SPBE oleh Kementerian Kominfo.

Nilai indeks SPBE Kabupaten Blitar pada tahun 2018 sebesar 2,14 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 2,9, atau lebih tinggi dibanding rata-rata Nilai Indeks SPBE Nasional sebesar 2,18. Adapun pada tahun 2020 berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: B/386/M.KT.03/2020 perihal Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2020, Kabupaten Blitar tidak termasuk di dalam 130 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang diambil sebagai sampling evaluasi SPBE. Pada tahun 2021 terdapat penambahan indikator dari 37 menjadi 47 indikator dalam penilaian SPBE, sehingga berdampak terhadap capaian nilai Indeks SPBE sebesar 2,76 atau masuk kategori "Baik". Adapun Tahun 2022 Indeks SPBE Kabupaten Blitar kembali turun menjadi sebesar 2,61 atau masuk kategori "Baik". Capaian ini memang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,76, namun masih lebih tinggi dibanding rata-rata Indeks SPBE Nasional sebesar 2,35. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2022 oleh Kementerian PAN dan RB, dari 4 domain penilaian SPBE (Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE), domain Manajemen SPBE memiliki nilai yang terendah.



Domain ini terdiri dari aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK, termasuk Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data. Ke depan, aspek-aspek inilah yang perlu diperkuat kinerjanya, terlebih dengan kebijakan satu data, maka Manajemen Data SPBE menjadi penting karena menentukan kualitas pengelolaan data sehingga dapat diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Tahun 2023, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2023, capaian naik secara sangat signifikan, dimana skor Indeks SPBE Kabupaten Blitar menjadi 3,63 poin, yang mana angka ini mampu mencapai target kinerja nilai Indeks SPBE sebesar 3,00 poin atau target kinerja IKU daerah tercapai kinerja sebesar 121% di tahun 2023. Kenaikan skor nilai Indeks SPBE ini diikuti dengan kenaikan skor komponen/variabel Indeks SPBE, yaitu indeks Tata Kelola SPBE sebesar 3,60 poin dan nilai layanan SPBE sebesar 4,07 poin.

Identifikasi permasalahan yang masih terjadi pada tahun 2024 ada 4 hal, yaitu *pertama*, belum optimalnya capaian Indeks SPBE khususnya untuk komponen/ variabel indeks Tata Kelola SPBE dan nilai layanan SPBE; *kedua*, cakupan wilayah/ ruang publik terkoneksi internet masih perlu diperluas, sebagai bagian dari upaya untuk penguatan program *smart city*; *ketiga*, peningkatan kualitas sistem jaringan untuk meningkatkan kecepatan akses dan layanan publik oleh perangkat daerah dan *keempat*, peningkatan kualitas nilai keterbukaan informasi publik daerah. Sedangkan pada tahun 2025 identifikasi permasalahan Nampak pada kurangnya kualitas SDM pelaksana penyelenggaraan SPBE dan juga komitmen pimpinan perangkat daerah.

Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2026 terhadap hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel 3 terlampir:

Table 3 Reviu Rencana Kerja RKPD 2026 Dinas Kominfo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	92%	5.288.084.121	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	92%	5.288.084.121	
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	92%	46.884.500	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase dokumen	92%	46.884.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	92%	3.355.050.019	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	92%	3.355.050.019	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi	92%	172.188.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi	92%	172.188.000	

			Kepegawaian Perangkat Daerah					Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	92%	381.310.579	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Blitar	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	92%	381.310.579	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	92%	187.585.449	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	92%	187.585.449	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	92%	839.422.424	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	92%	839.422.424	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	92%	305.623.150	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	92%	305.623.150	
	Program Pengelolaan Informasi Dan	Kab. Blitar	Tingkat kepuasan masyarakat	86%	2.224.975.14 4	Program Pengelolaan Informasi Dan	Kab. Blitar	Tingkat kepuasan masyarakat	86%	2.224.975.144	

	Komunikasi Publik		terhadap akses informasi (hasil survey KIM)			Komunikasi Publik		terhadap akses informasi (hasil survey KIM)			
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	60%	2.224.975.144	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	60%	2.224.975.144	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kab. Blitar	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50%	4.216.137.450	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kab. Blitar	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50%	4.216.137.450	
			Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	100%				Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	100%		
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	3.279.539.050	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	3.279.539.050	

	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	20 kebijakan	936.598.400	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	20 kebijakan	936.598.400	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Blitar	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	70 %	800.000.000	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kab. Blitar	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	70 %	800.000.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	52 PD	800.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Blitar	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	52 PD	800.000.000	

	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab. Blitar	Jumlah Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi SMKI dan atau persandian	100%	323.919.450	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Kab. Blitar	Jumlah Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi SMKI dan atau persandian	100%	323.919.450	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Kab. Blitar	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian	70%	323.919.450	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Kab. Blitar	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip aplikasi persandian	70%	323.919.450	
					323.919.450						

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pembangunan Nasional periode 2020-2025 memiliki visi ***“Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur”***, yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi/agenda pembangunan yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi, dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transfromasu supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
7. Dukungan sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah skaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan.

Untuk tema RKPD Provinsi Tahun 2025 adalah "**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan**". Tema pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur ini selaras dengan arah pembangunan RPD tahun 2025-2026 dan masih bersifat sementara, menunggu tema perencanaan pembangunan RKP dari pusat untuk dilakukan penyelarasan lebih lanjut. Demikian juga, terkait dengan tema RKPD Provinsi Jawa Timur ini selaras dengan tema pokok pembangunan nasional, yaitu transformasi ekonomi dan sumber daya manusia. RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini terbagi ke dalam 9 prioritas pembangunan, yaitu:

1. Prioritas 1: Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial.
2. Prioritas 2: Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun ekonomi unggulan.
3. Prioritas 3: Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan.
4. Prioritas 4: Pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan.
5. Prioritas 5: Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.

6. Prioritas 6: Pembangunan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan berbasis Kerakyatan.
7. Prioritas 7: Pembangunan ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, BUM Desa, dan mendorong pemberdayaan Pemerintahan Desa.
8. Prioritas 8: Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan Anti Korupsi.
9. Prioritas 9: Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

Tabel 3. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. BLITAR TAHUN 2025																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRITA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PANGUNGJAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14			15		16	17
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN							12.853.116.165,00	13.065.191.534,00	13.535.536.637,00	682.420.472,00							11.194.294.800,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							12.853.116.165,00	13.065.191.534,00	13.535.536.637,00	682.420.472,00							11.194.294.800,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							11.729.196.715,00	12.006.701.134,00	12.601.335.137,00	872.138.422,00							9.666.908.949,00		
1.	2.16.01	PROGRAM PENUJUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.288.084.121,00	4.870.129.684,00	5.215.059.087,00	-1.210.513.417,00							4.077.570.704,00		
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Peningkatan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	46.884.500,00	117.747.284,00	110.150.227,00	63.265.727,00				-	-	-	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	20.791.600,00	35.437.884,00	31.770.827,00	10.979.227,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	26.092.900,00	82.309.400,00	78.379.400,00	52.286.500,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.355.050.019,00	3.307.013.084,00	3.582.988.417,00	227.938.398,00				-	-	-	2.927.841.214,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.308.549.165,00	3.267.649.134,00	3.563.624.467,00	255.075.302,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.896.041.214,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	41.140.000,00	38.000.000,00	18.000.000,00	-23.140.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Pengumpulan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Pengumpulan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				7 Laporan	7 Laporan	5.360.804,00	1.363.950,00	1.363.950,00	-3.996.904,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	172.188.000,00	85.970.000,00	50.000.000,00	-122.188.000,00				-	-	-	278.781.745,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				28 Orang	28 Orang	172.188.000,00	85.970.000,00	50.000.000,00	-122.188.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		278.781.745,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	381.310.579,00	286.588.140,00	194.170.877,00	-187.139.702,00				-	-	-	278.781.745,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.792.425,00	4.317.500,00	3.230.500,00	-1.555.925,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.525.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	23.671.084,00	21.827.300,00	21.827.447,00	-2.013.637,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		99.386.095,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	142.623.000,00	101.030.800,00	89.447.250,00	-53.175.750,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		64.150.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	22.551.070,00	28.913.940,00	3.230.080,00	-17.320.960,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.720.850,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.06.0009	Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	185.923.000,00	128.748.600,00	72.849.600,00	-113.073.400,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALKASI UMUM (DAU)	-	-	-		78.499.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Mlik Daerah Penrugung Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	187.585.449,00	27.008.500,00	58.960.200,00	-128.625.249,00			-	-	-		250.500.345,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	187.585.449,00	27.008.500,00	58.960.200,00	-128.625.249,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.500.345,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungut Urutan Pemerintahan Daerah	-				-	-	839.442.424,00	761.344.816,00	790.463.816,00	-48.978.608,00			-	-	-		198.042.100,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.470.000,00	2.980.000,00	1.490.000,00	-2.980.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.550.000,00	66.620.400,00	97.229.400,00	90.679.400,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALKASI UMUM (DAU)	-	-	-		7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	828.422.424,00	691.744.416,00	691.744.416,00	-136.678.008,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALKASI UMUM (DAU)	-	-	-		186.442.100,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penrugung Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	305.623.150,00	284.457.860,00	428.325.550,00	122.702.400,00			-	-	-		138.623.555,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	128.910.000,00	128.910.000,00	128.910.000,00	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.623.555,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi				1 Unit	1 Unit	176.713.150,00	155.547.860,00	299.415.550,00	122.702.400,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALKASI UMUM (DAU)	-	-	-		48.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-				-	-	2.224.975.144,00	2.181.071.000,00	2.528.884.000,00	2.014.536.305,00							4.239.511.449,00		
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.224.975.144,00	2.181.071.000,00	2.528.884.000,00	303.908.856,00			-	-	-		4.239.511.449,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik																					
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				4 Permoho nan	4 Permoho nan	267.412.200,00	227.450.000,00	218.420.000,00	-48.992.200,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.02.2.01.0019 Monitoring informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																					
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintahan Daerah				2 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	369.379.977,00	318.360.000,00	459.411.200,00	90.031.223,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALKASI UMUM (DAU)	-	-	-		738.723.449,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik																					
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemandatan media berbayar sesuai kriteria jurnal				99 Media	99 Media	1.588.182.967,00	1.635.261.000,00	1.851.052.800,00	262.869.833,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALKASI UMUM (DAU) DBH CIUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	-		3.300.788.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-				-	-	4.216.137.450,00	4.955.500.450,00	4.857.392.050,00	-2.866.310.654,00							1.349.826.796,00		
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.279.539.050,00	4.236.488.500,00	4.271.164.300,00	991.625.250,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agribisnis industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHER PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPO TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3.279.539.050,00	4.236.488.500,00	4.271.164.300,00	991.625.250,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	936.598.400,00	719.011.950,00	586.227.750,00	-350.370.650,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	-	1.349.825.796,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				25 Aplikasi	25 Aplikasi	15.600.000,00	53.292.400,00	44.354.400,00	28.754.400,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			123.800.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0015	fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengembangan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	79.197.200,00	65.508.800,00	42.144.000,00	-37.053.200,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			120.813.072,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	49.000.000,00	0,00	0,00	-49.000.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			95.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	148.601.200,00	130.954.450,00	109.185.450,00	-39.415.750,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			89.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dibembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				31 Aplikasi	31 Aplikasi	398.260.000,00	393.514.200,00	356.348.800,00	-41.911.200,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			391.907.927,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				3 Aplikasi	3 Aplikasi	13.600.000,00	26.974.000,00	14.837.000,00	1.237.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendukung kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTETRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDULAH		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang melakukan sosialisasi program Kabupaten Kota Cerdas				52 unit	52 unit	205.140.000,00	48.768.100,00	19.358.100,00	-185.781.900,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		144.844.151,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Portal yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				1 Layanan	1 Layanan	13.600.000,00	0,00	0,00	-13.600.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten Kota Cerdas				1 Program	1 Program	13.600.000,00	0,00	0,00	-13.600.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	-		144.861.446,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							800.000.000,00	678.000.000,00	573.998.900,00	-226.001.100,00							1.500.000.000,00		
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-	-	-	-	-	800.000.000,00	678.000.000,00	573.998.900,00	700.000.000,00							1.500.000.000,00		
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	800.000.000,00	678.000.000,00	573.998.900,00	-226.001.100,00							1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				54 Orang	54 Orang	149.874.000,00	153.220.000,00	77.164.000,00	-72.710.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	100 Persentase	40.899.600,00	15.532.800,00	15.532.800,00	-25.366.800,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rata tepat waktu				80 Persentase	80 Persentase	99.998.000,00	20.029.000,00	9.646.800,00	-90.311.200,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah lengkap melaksak				15 Dokumen	15 Dokumen	456.162.000,00	434.624.000,00	434.624.000,00	-21.538.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				30 Dokumen	30 Dokumen	53.106.400,00	54.594.200,00	37.031.300,00	-16.075.100,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							323.919.450,00	380.490.400,00	360.202.600,00	36.283.150,00							17.385.851,00		
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-	-	-	-	-	323.919.450,00	380.490.400,00	360.202.600,00	-306.533.590,00							17.385.851,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			2.21.02.2.01	-	-	323.919.450,00	380.490.400,00	300.202.600,00	36.283.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		17.385.851,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan		323.919.450,00	380.490.400,00	300.202.600,00	36.283.150,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			17.385.851,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		JUMLAH							12.853.116.165,00	13.065.191.534,00	13.535.536.637,00	682.420.472,00					11.184.294.800,00			

Berdasarkan arahan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Blitar yang ditetapkan adalah "**Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah**". Tema ini selaras dalam mendukung sasaran pembangunan nasional dan pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui beberapa prioritas pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
2. Meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang;
4. Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik; dan
5. Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Keselarasan Prioritas Pembangunan RKP, RKPD Provinsi Jawa Timur,



Sumber : RKPD Kabupaten Blitar, 2025.

Dinas Kominfo sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, serta statistik dan persandian, secara langsung turut melaksanakan mendorong pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dinas Kominfo yang mengampu 3 urusan, mendukung pencapaian prioritas

pembangunan nasional ke-2 yaitu mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi, dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan. Sedangkan, untuk pencapaian sasaran pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung prioritas pembangunan ke-8 yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan Anti Korupsi. Pada pencapaian sasaran tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar pada prioritas ke-4 yaitu penguatan *e-government* dan pelayanan publik. Salah satu strategi untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut, maka Dinas Kominfo wajib melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan untuk memperoleh sinkronisasi pencapaian sasaran dan efektifitas luaran melalui penyusunan RKPD yang selaras dengan RKP, dan memastikan OPD dalam menyusun Renja juga selaras dengan dokumen diatasnya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinas Kominfo yang didasarkan rumusan isu –isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam satu sasaran yaitu meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE. Rencana Kerja Dinas Kominfo didasarkan pada rumusan isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur Dinas Kominfo yang profesional dan kredibel melalui literasi digital.
2. Meningkatkan pelayanan publik berbasis *e-government*.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang sesuai standar SPBE dan akuntabel.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berkaitan dengan dengan tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas Kominfo sebagai salah satu OPD di lingkup Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk merumuskan melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi publik, penyelenggaraan E-government, statistika sektoral dan persandian memiliki peran penting dalam terwujudnya meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kominfo sesuai tercantum dalam dokumen renstra 2021-2026 adalah Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan Penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi. Selanjutnya tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran yang diukur dengan indikator Persentase layanan publik yang sesuai dengan standar SPBE.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan menunjang pencapaian tema RKPD 2025 yaitu adalah Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah serta terkait dengan prioritas pembangunan RKPD ke 4 yaitu Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik.

Table 5 Persentase Capaian IKU Dinas Kominfo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian tahun 2023	Target Tahun 2025
	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi	Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan SPBE	Nilai Tata Kelola SPBE	3,00	4,30
			Nilai Layanan SPBE	4,07	4,32

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, dilakukan melalui penetapan strategi dan arah kebijakan tahun 2025, yaitu:

1. Strategi-1: Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
 - Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada ruang publik;
 - Meningkatkan pembangunan aplikasi sesuai standart SPBE untuk mewujudkan *e-government* terintegrasi;
 - Meningkatkan pengetahuan pengelolaan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Aparatur;
 - Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk mendukung *e-government*
2. Strategi-2: Peningkatan Komunikasi Publik, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
 - Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi penangkalan berita hoax;
 - Meningkatkan Literasi Digital kepada Masyarakat;
 - Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat.
3. Strategi-3: Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Statistik, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:

- Meningkatkan Pengelolaan Media Informasi Pemerintah;
 - Mengoptimalkan Penerapan Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital;
 - Meningkatkan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah melalui Berbagai Media;
 - Meningkatkan Kerjasama dengan BPS dalam Penerbitan Produk Data Statistik;
 - Membangun Data Center yang baik dan Terintegrasi;
 - Meningkatkan Pembinaan dan Penguatan Regulasi terkait Pemanfaatan Data seluruh Perangkat Daerah.
4. Strategi-4: Peningkatan Pelayanan Persandian, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan:
- Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Persandian dan Telekomunikasi;
 - Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika;
 - Meningkatkan Pemerataan Pengetahuan dan Literasi terkait Keamanan Sistem Informasi yang Berpedoman pada Indeks Kemanan Informasi.

Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar merencanakan akan melaksanakan sebanyak 5 Program dan 12 kegiatan didukung oleh 34 sub kegiatan, yaitu:

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah jumlah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor disediakan 10 paket



- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 14 paket.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 paket.
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 6 paket
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang Disediakan: 1 dokumen
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: 1 laporan
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Adapun Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran 14 unit.
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 orang.
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Adapun indikatornya adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 dokumen.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Adapun indikatornya adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan

Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 7 laporan

4. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen yang disusun, ditargetkan sebanyak 3 dokumen, Renstra, Renja, Renja-P
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen yang disusun, ditargetkan sebanyak 5 dokumen, yaitu LKjIP, Laporan Capaian Kinerja, Tribulan, Renaksi Evaluasi, LPPD, LKPJ.
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, Adapun indikatornya adalah Jumlah Pegawai.
 - b. Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Adapun indikatornya adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Adapun indikatornya adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 laporan
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Adapun indikatornya adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 laporan



7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Adapun indikatornya adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 unit.
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Adapun indikatornya adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit.

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten.

- a. Pengelolaan Media Komunikasi. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2 dokumen.
- b. Pelayanan Informasi Publik. Adapun output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 1 dokumen.
- c. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik. Adapun keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi 2 dokumen.

Program Aplikasi Informatika

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Adapun indikatornya adalah Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, Balai Penyuluh Pertanian, Laboratorium, Pasar, Pelayanan Publik, Area Publik (154 titik);
- b. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten.
 1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik Adapun indikatornya adalah jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan 52 unit
 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. Adapun indikatornya adalah 1 dokumen
 3. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas. Adapun indikatornya adalah jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan smartcity 1 dokumen.
 4. Monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan Ekosistem SPBE. Adapun indikatornya adalah dokumen monitoring , evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE 1 dokumen
 5. Pengelolaan pusat data pemerintah daerah. Adapun indikatornya adalah pusat data pemerintah daerah yang dikelola 1 unit

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten.
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Adapun



indikatornya adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 4 dokumen.

2. Membangun Meta data Statistik Sektoral. Adapun indikatornya adalah Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun 1 dokumen

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik adapun indikatornya adalah 1 laporan.

Table 6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Blitar	92 %	5.288.084.121	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		93 %	4.077.570.704
	<i>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Kab. Blitar	92 %	46.884.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92 %	5.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Kab. Blitar	3 dokumen	20.791.600	Dana Transfer Umum-Dana		3 dokumen	2.000.000

		Perencanaan perangkat daerah yang disusun				Alokasi Umum			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Blitar	4 laporan	26.092.900			4 laporan	3.000.000
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Kab. Blitar	92%	3.355.050.019	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		92 %	2.927.841.214
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Blitar	27 orang/bulan	3.308.549.165	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		27 Orang/bulan	2.896.041.214
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Blitar	1 dokumen	41.140.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 dokumen	30.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Blitar	7 laporan	5.360.854,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 laporan	1,800,000
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar	92%	172.188.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92 %	278.781.745
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Blitar	0 orang	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 orang	278.781.745

	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Kab. Blitar	92%	381.310.579	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92 %	278.781.745
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	10 paket	4.792.425	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 paket	10.525.800
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	14 paket	23.671.084	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 paket	99.386.095
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	6 paket	142.623.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 paket	64.150.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Kab. Blitar	6 paket	22.551.070	Dana Transfer		6 paket	24.720.850

		Penggandaan yang Disediakan				Umum-Dana Alokasi Umum			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Blitar	1 dookumen	1.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	1.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Blitar	1 laporan	185.923.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	78.499.000
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	Kab. Blitar	92 %	187.585.449	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92 %	250.500.345

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Blitar	14 unit	187.585.449	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		14 unit	250.500.345
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Permerintah Daerah</i>	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	Kab. Blitar	92%	839.442.424	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		92 %	198.042.100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Blitar	1 laporan	4.470.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 laporan	4.600.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Kab. Blitar	1 laporan	6.550.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 laporan	7.000.000

		Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Blitar	1 laporan	828.422.424	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	138.623.555
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kab. Blitar	92 %	305.623.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		92%	138.623.555
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, kaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Blitar	15 unit	128.910.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 unit	90.623.555

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Blitar	1 unit	176.713.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	48,000,000
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses informasi (Hasil Survey IKM)	Kab. Blitar	86%	2.224.975.144			86%	4.239.511.449
	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan STRAKOM	Kab. Blitar	60%	2.224.975.144	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 %	4.239.511.449
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi	Kab. Blitar	2 dokumen	369.379.977	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	738.723.449

		Publik							
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Blitar	1 dokumen	1.588.182.967	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	3.300.788.000
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Blitar	1 dokumen	267.412.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	200.000.000
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Perangkat Daerah yang Terlayani Infrastruktur TIK	Kab. Blitar	50 persen 100 persen	4.216.137.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 persen 100 persen	1.349.826.796

	<i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Kab. Blitar	100%	3.279.539.050	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	0
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemenntah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Blitar					154 unit	0
	<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah regulasi/kebijakan TIK terkait implementasi e-government	Kab. Blitar	154 unit	936.598.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		20 kebijakan	1.349.826.796
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan	Kab. Blitar	52 Aplikasi	15.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 unit	123.800.200

		di Pusat Data Nasional							
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kab. Blitar	1 laporan	79.197.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		52 unit	120.813.072
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Kab. Blitar	1 dokumen	49.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 dokumen	95.000.000
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE</i>	Kab. Blitar	1 dokumen	148.601.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 dokumen	89.000.000
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana	Kab. Blitar	31 Aplikasi	398.260.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		31 Aplikasi	391.907.927

		SPBE pemerintah daerah							
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar	3 Aplikasi	13.600.000			3 Aplikasi	120.000.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Blitar	52 Unit	205.140.000			52 Unit	120.000.000
	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan	Kab. Blitar	1 Layanan	13.600.000			1 layanan	120.000.000

		Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional							
	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Kab. Blitar	1 Program	13.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 program	144.661.446
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Kab. Blitar	70%	800.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70%	1.500.000.000
	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah PD yang menggunakan data	Kab. Blitar	52 OPD	800.000.000	Dana Transfer Umum-Dana		52 OPD	1.500.000.000

		statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah				Alokasi Umum			
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Blitar	54 orang	149.874.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4 dokumen	300.000.000
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kab. Blitar	100 %	40.899.600				300.000.000
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang	Kab. Blitar	60%	99.958.000	Dana Transfer Umum- Dana			300.000.000

		rilis tepat waktu				Alokasi Umum			
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Blitar	15 Dokumen	456.162.000,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			300.000.000
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Kab. Blitar	30 dokumen	53.106.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		30 dokumen	300.000.000
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Kab. Blitar	100%	323.919.450	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	17.385.851
	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota</i>	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip	Kab. Blitar	85%	323.919.450	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		70%	17.385.851

		aplikasi persandian							
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Blitar	1 laporan	323.919.450	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1 laporan	17.385.851

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar mengampu tiga urusan pemerintahan daerah yaitu dan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025, maka Dinas Kominfo Kabupaten Blitar pada tahun 2025 merencanakan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebanyak 5 program, 12 kegiatan, dan 34 sub kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD senilai **Rp. 13.535.536.637,-**.

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kominfo Tahun 2025 diatas, maka diperlukan langkah-langkah yang strategis yang dijabarkan dalam Rencana Aksi dan pagu indikatif tiap kegiatan prioritas sebagai berikut:

Table 7 Rencana Aksi dan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Kominfo Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas 2025	Rencana Aksi	Pagu Indikatif Kegiatan (Rp.)	Keterangan
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik		2.528.884.000	
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		218.420.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		459.411.200	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		1.851.052.800	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		4.857.392.050	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		4.271.164.300	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas 2025	Rencana Aksi	Pagu Indikatif Kegiatan (Rp.)	Keterangan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain		4.271.164.300	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		586.227.750	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional		44.354.400	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		42.144.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		109.185.450	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		356.348.800	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		14.837.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		19.358.100	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah		0	Kurangnya <i>support</i> anggaran
	Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi		0	Kurangnya <i>support</i> anggaran
	Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas		0	Kurangnya <i>support</i> anggaran
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor		573.998.900	Mendukung Prioritas Nasional dan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas 2025	Rencana Aksi	Pagu Indikatif Kegiatan (Rp.)	Keterangan
				Daerah
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		573.998.900	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		77.164.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		15.532.800	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		9.646.800	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data		434.624.000	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Sub kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		37.031.300	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		360.202.600	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		360.202.600	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.		360.202.600	Mendukung Prioritas Nasional dan Daerah

BAB IV

PENUTUP

Seiring makin stabil dan mantapnya perkembangan ekonomi daerah dan dinamika sosial daerah Kabupaten Blitar, maka Pemerintah Daerah makin agresif dalam melakukan program dan kegiatan yang berdampak pada makin berkembangnya kesejahteraan masyarakat. Dinas Kominfotiksan memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang peningkatan pelayanan publik berbasis TIK. Implementasi TIK memberikan jaminan efektifitas, kepastian dan efisiensi pelayanan publik yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja ekonomi daerah.

Penerapan e-government yang semakin massif di dalam tata kelola pemerintahan mendorong kebutuhan perlunya dukungan kapasitas dan jaringan infrastruktur TIK yang semakin baik. Dalam situasi ini yang tidak boleh terlupakan adalah keberlanjutan usaha pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance melalui SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Dimana poin ini menjadi fokus utama dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) dalam rangka audit kinerja tahun 2025. Melalui e-government ini pula diharapkan bahwa pelayanan publik dapat menjadi maksimal, efektif, dan efisien.

Dalam pelaksanaan perubahan penyusunan rencana kerja Dinas Kominfotiksan di tahun 2025 ini tentu mendapati berbagai hambatan dan tantangan selain terkait perubahan eksternal, perubahan kebijakan dari pusat, terbatasnya SDM, antara lain bahwa saat ini kompetensi aparatur Diskominfo masih kurang sesuai standar, sehingga didalam internal Dinas Kominfo sendiri akan melakukan bimtek terkait teknologi sehingga semua aparatur akan memiliki kompetensi yang sama dan sesuai standar. Serta isu lain yang sekiranya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Kominfotiksan, sudah sepatutnya Dinas Kominfo peka dan cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan. Melalui penyusunan rencana kerja Dinas Kominfotiksan tahun 2025 ini diharapkan bahwa tujuan Perangkat Daerah



yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan dengan pengoptimalan penerapan SPBE dalam pelayanan publik yang terintegrasi tetap dapat terwujud.

Selanjutnya jika di dalam perencanaan program dan kegiatan terdapat ketidaksesuaian baik dikarenakan situasi tertentu sehingga menyebabkan dilakukannya perubahan struktural ataupun perubahan lainnya termasuk realokasi/refocusing anggaran maka Dinas Komunikasi dan Informatika tetap berkomitmen untuk memaksimalkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah direncanakan.

Kaidah-kaidah :

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumber daya yang tersedia;
1. Memperhatikan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya;
2. Permasalahan yang ada dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
3. Tujuan yang ingin dicapai;
4. Kebijakan, sasaran dan prioritas perangkat daerah untuk mencapai tujuan;
5. Prioritas tema pembangunan pemerintah saat ini untuk menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Tindak Lanjut :

Selanjutnya dalam rangka tindak lanjut daripada rencana kerja tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau di sisi lain melebihi target yang telah direncanakan. Untuk itu diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindak lanjut sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target.

Sebagai penutup apabila terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan harapan, maka kedepannya diharapkan untuk lebih intens dalam peningkatan kualitas perencanaan sehingga perangkat daerah mampu untuk mencapai target kinerja program maupun kegiatan dan memiliki kualitas indikator kinerja yang jauh lebih baik dan smart.

Blitar, Juli 2025

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

KABUPATEN BLITAR

DINAS
KOMINFO STATISTIK
DAN PERSANDIAN

HERMAN WIDODO, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650916 199112 001